

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Kajian Model Pembelajaran Abad 21

a. Pengertian model pembelajaran

Model pembelajaran menurut (Sulaiman, S.Pd. et al., 2024 hlm. 5) menjelaskan kerangka konseptual atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Model pembelajaran menentukan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Model pembelajaran mencakup strategi pembelajaran urutan kegiatan, alokasi waktu dan penilaian hasil pembelajaran.

Menurut Arends dalam Trianto (2022 hlm. 2) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan menurut Joyce & Weli dalam (Rusman, 2010 hlm. 133) Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan para guru untuk memilih model pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dapat disimpulkan model pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Dalam model ini, terdapat berbagai elemen penting yang saling terkait, seperti strategi pembelajaran yang digunakan, urutan kegiatan yang dilakukan, alokasi waktu yang tepat, serta cara penilaian hasil belajar peserta didik.

b. Ciri-ciri model pembelajaran

Model pembelajaran menurut (Rusman, 2010 hlm. 136) dalam bukunya menyebutkan model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen dan

berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang melatih partisipasi dalam kelompok.

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan induktif. proses berpikir.
3. Memiliki bagaian bagaian model yang terdiri dari urutan langkah langkah pembelajaran (*syntax*) adanya prsip-prinsip reaksi peserta didik,
4. Memilikidampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran,yaitu hasil belajar yang dapat diukur serta dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang.

Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar dalam Agus Purnomo (2022 hlm. 8) ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.
- 2) Dapat dijadikan pedoman pembelajaran untuk perbaikan kegiatan pembelajaranDapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelaran di kelas.
- 3) Memiliki perangkat bagian model.
- 4) Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu ciri -ciri model pembelajaran memiliki ciri utama yang menjadikannya sebagai pendekatan yang sistematis dalam pembelajaran. Model pembelajaran didasarkan pada teori pendidikan dan teori belajar tertentu, memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta dirancang untuk membentuk pola pikir dan keterampilan peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, inovatif, bermakna bagi peserta didik serta membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran secara optimal.

c. Jenis-jenis model pembelajaran

Berbagai model pembelajaran dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan cara mereka memahami informasi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dalam implementasinya, guru perlu menyadari bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang paling cocok untuk semua situasi dan kondisi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor saat memilih model pembelajaran, termasuk karakteristik siswa, ketersediaan fasilitas, materi ajar, serta kemampuan dan kesiapan guru. Sejalan dengan hal ini, berikut adalah beberapa model pembelajaran :

1) Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki arti kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran kooperatif melibatkan siswa untuk belajar dan bekerja secara kolaboratif dalam kelompok kecil yang terdiri dari dua hingga enam orang, dengan struktur kelompok yang heterogen. Keberhasilan belajar dan kelompok bergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individu maupun kelompok secara keseluruhan (Baehaqi, 2020). Menurut Pipit Mulyah dkk (2020, hlm. 31) menyatakan bahwa tujuan utama penerapan model pembelajaran kooperatif adalah untuk memungkinkan siswa belajar dalam kelompok bersama teman-teman mereka dengan cara menghargai pendapat satu sama lain dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara dan menyampaikan gagasan mereka.

2) Model Berbasis Masalah

Model berbasis masalah menurut Nur & Nurdin dalam Pipit Mulyah, dkk (2020, hlm.49) adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong berpikir tingkat tinggi pada siswa dalam situasi berorientasi masalah dunia nyata. Menurut Sulaiman et al., (2024, hlm. 7) pembelajaran berbasis masalah salah satu pembelajaran yang dimana peserta didik dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan. Peserta didik bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah,

mengumpulkan informasi, menganalisis situasi, dan menemukan solusi yang efektif. Artinya model pembelajaran berbasis masalah diharapkan peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan penerapan konsep dalam konteks yang nyata.

3) Model pembelajaran *Project Based Learning*

Model Project Based Learning adalah pembelajaran yang sangat berpusat kepada peserta didik, dan menekankan peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang sesuai dengan tema atau topik pada pembelajaran. (Salamun, Widyastuti Ana, Syawaluddin et al. 2020, hlm. 67). Menurut Sulaiman et al. (2024, hlm. 7) Model ini melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang mengharuskan mereka untuk menyelidiki, merencanakan, dan melaksanakan solusi atas masalah atau tantangan tertentu. Peserta didik belajar dengan melakukan dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks proyek yang relevan dengan kehidupan nyata.

4) Model Pembelajaran Diferensiasi

Sulaiman et al. (2024, hlm. 8) menjelaskan model pembelajaran Diferensiasi menyesuaikan pengalaman pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Guru mengidentifikasi perbedaan dalam gaya belajar, tingkat keterampilan, atau minat siswa, dan menyediakan materi, instruksi, atau penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Artinya model pembelajaran ini memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna.

5) Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL)

Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, suatu pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman menjadi relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun

pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran seumur hidup. Sehingga menurut Agus Purnomo (2022, hlm .60) Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran abad 21 sangat beragam sehingga dapat memaksimalkan potensi peserta didik dalam menghadapi tantangan global, peserta didik juga diharuskan aktif dalam proses selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, dapat dilihat bahwa setiap model memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam meningkatkan efektivitas pembelajara. Salah satu model dalam konteks pendidikan modern adalah model *Self Regulated Learning* (SRL) yang dimana akan dijelaskan dibawah ini.

2. Kajian Model *Self Regulated Learning*

a. Pengertian *Self Regulated learning*

Self Regulated Learning dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana pelajar melakukan strategi dengan meregulasi kognisi, metakognisi, dan motivasi. Strategi kognisi meliputi usaha mengingat kembali dan melatih materi terus-menerus, elaborasi, dan strategi mengorganisir materi. Strategi metakognisi meliputi merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Strategi motivasional meliputi menilai belajar sebagai kebutuhan diri atau sisi intrinsik, melakukan penghargaan terhadap diri sendiri, dan tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan chin, 2004 (dalam (Kristiyanti 2016, hlm. 12). Sedangkan *Self Regulated Learning* menurut (Zimmerman, dalam Kristiyanti 2016, hlm. 13) meliputi beberapa karakteristik seperti (1) siswa menyadari proses regulasi diri mereka dan bagaimana proses tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik mereka; (2) siswa melakukan proses pemberian umpan balik pada diri sendiri selama proses belajar dan memonitor efektivitas dari metode

atau strategi belajar yang telah mereka lakukan; dan (3) memiliki komponen motivasi.

Meskipun kedua model definisi *Self Regulated Learning* di atas berbeda dalam konstruk dan mekanisme self regulated learning, terdapat beberapa asumsi umum tentang belajar dan regulasi yang sama. Pertama, saat belajar, individu secara aktif mengkonstruksi sendiri makna, tujuan, dan strategi dari konteks eksternal seperti lingkungan internal. Kedua, pembelajar berpotensi dapat memonitor, mengontrol, dan meregulasi beberapa karakteristik kognisi, motivasi, dan tindakan mereka, dan dalam beberapa kasus, aspek dari lingkungan belajar. Ketiga, beberapa standar atau tujuan ditetapkan untuk berbagai permasalahan dalam proses belajar. Keempat, perilaku regulasi diri merupakan mediator antara karakteristik personal dan kontekstual dengan prestasi akademik, tetapi dapat juga memiliki pengaruh langsung pada prestasi. Kelima, *Self Regulated Learning* terdiri dari tahap yang berbeda dan area regulasi yang bervariasi (Pintrich, 2000 dalam Kristiyanti 2016 hlm. 16).

Berdasarkan asumsi tersebut, *Self Regulated Learning* dapat didefinisikan sebagai keterlibatan proaktif dalam perilaku belajar seseorang di mana siswa mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk digerakkan secara sistematis dengan berorientasi pada pencapaian tujuan siswa sendiri. Selanjutnya siswa akan memonitor tujuan akademik dan motivasi untuk mereka sendiri, mengelola sumber daya manusia dan material, serta menjadi subjek atas keputusan dan performansi dalam seluruh proses belajar.

b. Strategi-strategi dalam *self regulated learning* (SLR)

Di dalam *Self Regulated Learning* terdapat strategi-strategi yang dilakukan ketika siswa berhadapan dengan tugas tertentu. Menurut Zimmerman 1989 (Kristiyanti Titik, 2016) mendeskripsikan strategi strategi dalam *Self Regulated Learning* sebagai berikut:

- 1) *Self-Evaluating*, yaitu inisiatif untuk mengevaluasi kualitas atau kemajuan dalam belajar secara mandiri. Strategi ini umumnya

digunakan ketika siswa telah selesai mengerjakan tugas tertentu dan mendapat umpan balik dari guru. Siswa yang memiliki *Self Regulated Learning* tinggi akan mempelajari umpan balik yang diberikan guru untuk mengidentifikasi apa saja materi yang telah dipahami dan yang belum dipahami.

- 2) *Organizing And Transforming*, yaitu inisiatif untuk mengorganisasikan materi pelajaran. Ketika menerima materi, siswa dengan *Self Regulated Learning* tinggi akan membuat klasifikasi materi terlebih dahulu. Hal ini akan membantunya dalam mempelajari materi.
- 3) *Goal-Setting And Planning*, yaitu penetapan tujuan belajar beserta perencanaan terkait konsekuensi, waktu, dan penyelesaian aktivitas yang terkait tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum proses belajar dimulai, perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan beserta target-target untuk mencapainya.
- 4) *Seeking Information*, yaitu usaha untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan tugas-tugas belajarnya melalui sumber-sumber non sosial. Pencarian informasi ini dilakukan dengan asumsi siswa sudah mempelajari materi tertentu dan membutuhkan pendalaman terhadap materi tertentu atau penjelasan terhadap materi yang belum dipahami. Berbagai sumber dapat digunakan, seperti buku, internet, dan sebagainya.
- 5) *Keeping Records And Monitoring*, yaitu usaha untuk mencatat kejadian-kejadian dan hasil-hasil belajar. Proses belajar pada siswa dengan *Self Regulated Learning* tinggi tidak lepas dari pantauan. Siswa mencatat setiap kejadian yang muncul sehingga kemajuan belajar dapat diketahui.
- 6) *Environmental structuring*, yaitu usaha untuk mengatur lingkungan. Secara fisik supaya proses belajar menjadi lebih mudah. Lingkungan belajar merupakan hal yang penting dalam memengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan yang kondusif

akan mendukung proses belajar, dan ini dapat diciptakan oleh peserta didik sendiri.

- 7) *Self-Consequating*, yaitu upaya menyusun atau membayangkan hadiah dan hukuman atas keberhasilan dan kegagalan yang dialami dalam belajar. Supaya menjadi pengalaman mengesankan sehingga terus dapat diingat, setiap hasil belajar perlu diberi konsekuensi. Pemberian konsekuensi ini akan memudahkan siswa mengingat apa yang sudah baik dalam dirinya dan apa yang masih perlu diperbaiki.
- 8) *Rehearsing And Memorizing*, yaitu usaha untuk mengingat materi dengan mempraktekkan, baik dalam bentuk perilaku terbuka maupun tertutup. Agar dapat dipanggil kembali jika diperlukan, materi pelajaran perlu disimpan baik-baik dalam ingatan siswa. Terdapat banyak sekali metode mengingat materi, dan siswa dapat mengenali metode manakah yang paling sesuai untuk pelajaran tertentu dan sesuai dengan karakteristik pribadinya.
- 9) *Seeking Social Assistance*, yaitu usaha untuk mendapatkan bantuan dari teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Bertanya merupakan hal yang tidak pantang dilakukan oleh siswa dengan *Self Regulated Learning* tinggi. Jika mengalami kesulitan, siswa tidak sungkan mencari bantuan dari orang-orang di sekitarnya.
- 10) *Reviewing Records*, yaitu usaha untuk membaca kembali catatan, hasil- hasil ujian, atau textbook untuk menyiapkan ujian berikutnya.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi *self-regulated learning*

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri peserta didik yang dapat memengaruhi perkembangan tingkat *Self Regulated Learning* nya. Faktor diri yang terbukti memengaruhi *Self Regulated Learning* adalah keyakinan epistemologis (Metallidou, 2013; Muis, 2007); beliefs about learning (Law, Chan, & Sachs, 2008), emosi (Ahmed et al, 2013), dan personal agency beliefs (chong, 2007). Selain itu, faktor

usia dan kepribadian juga menentukan tinggi rendahnya tingkat *Self Regulated Learning* siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan dan kemauan dalam menunjukkan *Self Regulated Learning* menurut woolfolk 2005 (dalam Kristiyanti 2016, hlm.

43-45), meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang keadaan diri sendiri, tipe dan isi mata kuliah yang sedang diambil, tugas, strategi belajar, dan konteks di mana pelajar akan mengaplikasikan hasil belajar mereka. Pelajar yang efektif mengetahui siapa diri mereka dan bagaimana cara mereka belajar supaya efektif, misalnya bagaimana gaya belajar yang cocok dengan keadaan diri mereka, materi pelajaran apa yang dirasakan mudah dan sulit bagi mereka, serta bagaimana mengatasi hal-hal sulit ketika sedang belajar. Pengetahuan tentang diri sendiri dan hal-hal penting di sekitar diri pelajar ini memberi kontribusi besar bagi kemampuan *Self Regulated Learning* mereka.

2) Motivasi

Pelajar yang memiliki kemampuan regulasi diri yang baik lebih termotivasi untuk belajar dibanding mereka yang kurang mampu meregulasi diri. Mereka berminat pada proses mempelajari sesuatu, tidak hanya berorientasi pada hasil yang tampak di luar atau di depan orang lain. Semakin besar minat pelajar pada proses atau kegiatan belajar dan bukan hanya berfokus pada hasil belajar, semakin besar juga kesempatan pelajar tersebut untuk meningkatkan kemampuan regulasi diri dalam belajar.

3) Kemauan

Kemauan yang keras untuk melakukan kegiatan belajar akan membuat pelajar mampu membebaskan diri dari berbagai gangguan. Ketika belajar. Misalnya mereka mampu menentukan tempat belajar yang bebas dari gangguan serta mengetahui bagaimana cara mengatasi kecemasan atau rasa malas untuk

belajar. Pelajar yang memiliki kemauan keras akan memiliki kemampuan *Self Regulated Learning* yang tinggi.

4) Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan lebih menunjukkan penggunaan strategi *Self Regulated Learning* dibanding anak laki-laki (Morrison, 2009 dalam Kristiyanti 2016, hlm. 45). Pada peserta didik perempuan di smp, evaluasi diri berkorelasi positif dengan penggunaan *Self Regulated learning*, khususnya dalam bidang matematika anak perempuan lebih banyak menggunakan strategi *Self Regulated Learning* dibanding anak laki-laki, terutama dalam regulasi personal atau mengoptimalkan lingkungan dan bertahan dalam proses belajar . Jenis kelamin memiliki pengaruh yang berbeda dalam perubahan regulasi motivasi pada siswa tingkat 10-12. Faktor harga diri dan motivasi berprestasi berkembang lebih besar pada anak laki-laki, sedangkan motivasi intrinsik dan kemauan belajar lebih kuat berkembang pada anak perempuan.

5) Faktor Kemampuan/ Kecerdasan

Perkembangan kognitif ditemukan berkorelasi dengan penggunaan *Self Regulated Learning* peserta didik (S.G. Paris dan Paris, 2001). Siswa berbakat terbukti menggunakan strategi *Self Regulated Learning* yang lebih besar dibanding siswa yang tidak berbakat, terutama dalam mengorganisasi dan mentransformasi materi, konsekuensi diri, mencari bantuan teman sebaya saat membutuhkan, serta membuat catatan (Zimmerman,1990 dalam Kristiyanti 2016, hlm 45). Peserta didik yang berprestasi menunjukkan penggunaan yang lebih banyak dalam strategi *self reglated learning* (Purdie & Hattie, 1996). Penelitian pada siswa tingkat 5 dan 6 menunjukkan bahwa siswa berprestasi cenderung lebih memandang belajar sebagai aktivitas konstruktif dan lebih menaruh perhatian pada pencarian makna dari materi pelajaran dan lebih banyak menggunakan strategi *Self Regulated learning*,

sedangkan siswa yang berprestasi rendah cenderung mempercayai bahwa belajar dengan mengingat merupakan cara terbaik untuk mencapai prestasi dan tidak menggunakan strategi *Self Regulated Learning*. Peserta didik perempuan tingkat 10 lebih banyak menggunakan pola belajar mendalam dalam *Self Regulated Learning*.

Menurut perspektif kognitif sosial, faktor-faktor internal yang memengaruhi perkembangan *Self Regulated Learning* siswa meliputi (Zimmerman, 1989 dalam Kristiyanti 2016, hlm. 46) :

1) Pengaruh Personal

Pengaruh faktor personal terhadap *Self Regulated Learning* meliputi: pengetahuan siswa, proses metakognisi, tujuan, dan afeksi. Pengetahuan siswa dapat dibedakan menjadi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan regulasi diri. Pengetahuan deklaratif diorganisasikan berdasarkan struktur verbal, urutan, dan hirarkinya, sedangkan pengetahuan regulasi diri berupa strategi belajar atau standard siswa. Proses metakognisi meliputi perencanaan dan kontrol perilaku. Pembuatan keputusan metakognisi tergantung juga pada tujuan jangka panjang siswa. Tujuan siswa dan penggunaan proses kontrol metakognitifnya secara teoritis tergantung pada persepsi efikasi diri dan afeksi.

2) Pengaruh Perilaku

Tiga jenis respon siswa yang relevan dengan *Self Regulated Learning* meliputi: observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Observasi diri merupakan respon siswa yang meliputi pemantauan secara sistematis terhadap performansi mereka sendiri. Proses ini dapat menghasilkan informasi mengenai seberapa baik seseorang mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan. Observasi diri dipengaruhi oleh beberapa proses personal seperti efikasi diri, penetapan tujuan, dan perencanaan metakognisi. Penilaian diri merupakan respon siswa yang meliputi secara sistematis membandingkan performansinya dengan standar atau tujuan yang

sudah ditetapkan, sedangkan reaksi diri meliputi beberapa proses diri seperti penetapan tujuan, persepsi efikasi diri, dan perencanaan metakognisi, di mana hubungan ketiganya bersifat timbal balik.

- d. Faktor Eksternal yang memengaruhi perkembangan *Self Regulated Learning* peserta didik

Kendati bersifat individual, perkembangan *Self Regulated Learning* seorang Peserta didik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Faktor-faktor tersebut merupakan lingkungan di luar diri siswa yang sangat dekat dengan aktivitas belajarnya, yang meliputi:

- 1) Faktor Keluarga

Pola asuh dan keterlibatan orangtua dalam pendidikan terbukti memengaruhi regulasi diri dalam bidang akademik siswa. Pola asuh yang ideal dalam mendukung perkembangan *Self Regulated Learning* siswa adalah pola asuh demokratis, sedangkan pola asuh permisif terbukti berkorelasi negatif dengan regulasi diri di bidang akademik siswa. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu juga memiliki dampak yang berbeda dalam jenis regulasi diri siswa. Keterlibatan orangtua dalam pendidikan terbukti meningkatkan kemampuan regulasi diri siswa dalam belajar

(Carter & Winsler 2009 dalam Kristiyanti 2016, hlm.47-48)

Dukungan orangtua juga sangat memengaruhi perkembangan *Self Regulated Learning* siswa. Semakin besar dukungan dari orangtua yang dirasakan siswa, semakin besar pula kemungkinan siswa tersebut melakukan belajar berdasar regulasi diri. Orangtua di sekolah, telah diidentifikasi berbagai jenis keterlibatan orangtua dalam pendidikan anaknya dan pengaruhnya pada perkembangan anak. Keterlibatan orangtua yang termasuk dalam jenis cognitive intellectual yang dilakukan melalui pendampingan dalam pengerjaan pekerjaan rumah (pr) terbukti meningkatkan fungsi psikologis anak yang sebelumnya mempersepsi diri mereka sebagai anak yang kurang kompeten secara akademik. Jenis keterlibatan orangtua yang termasuk jenis personal dalam bentuk

dukungan otonomi pada anak berpengaruh positif pada ketekunan mereka dalam bidang akademik dengan dimediasi oleh peran perasaan otonomi dan kompeten peserta didik meningkatkan regulasi diri anak, dan mendukung performansi akademik yang baik.

2) Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang memengaruhi *Self Regulated Learning* adalah relasi guru dan peserta didik dukungan otonomi dan model pengajaran yang diberikan guru. Guru memiliki pengaruh besar pada perkembangan *Self Regulated Learning*.

Dari faktor sekolah, setidaknya terdapat dua faktor penting yaitu suasana pembelajaran di kelas dan relasi guru-siswa. faktor tersebut:

a) Suasana pembelajaran di kelas

Siswa yang berada dalam kelas dengan suasana belajar yang menarik, di mana guru mampu memberikan penjelasan dengan baik, serta memberi kesempatan pada siswa untuk memilih tugas belajar sendiri dan bekerja sama dengan siswa lain, maka akan semakin nampak penggunaan *Self Regulated Learning* siswanya. Penerapan metode belajar di kelas dan kualitas pekerjaan rumah yang diberikan guru (Ramdass & Zimmerman 2011 dalam (Kristiyanti 2016, hlm. 49) juga terbukti memengaruhi penggunaan *Self Regulated Learning* siswa. Siswa akan lebih mampu menggunakan bentuk regulasi diri dalam belajar secara efektif di kelas jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan bermakna. *Self Regulated Learning* siswa juga lebih meningkat ketika mereka memperoleh kesempatan untuk memilih produk dan proses yang akan dievaluasi, berunding mengenai tugas-tugas sekolah, kerjasama dengan teman

b) Relasi Guru Dan Peserta Didik

Faktor dari guru terbukti berkorelasi dengan penggunaan *Self Regulated Learning* siswa, yang meliputi relasi guru-guru.

(Whipp & Chiarelli 2004) menyatakan bahwa faktor lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan *Self Regulated Learning* siswa meliputi dukungan dari instruktur, dukungan dari teman sebaya, serta desain proses belajar di kelas. Pendapat ini dipertegas oleh (Zimmerman & Cleary 2006 dalam Kristiyanti ,2016 hlm. 50) yang mengatakan bahwa pada masa remaja, kepercayaan pada kemampuan sendiri, yang merupakan bagian dari *Self Regulated learning*, sangat dipengaruhi oleh perilaku dan atau umpan balik dari orang-orang penting di sekitar siswa, seperti orangtua, guru, konselor, serta teman sebaya.

c) Faktor teman sebaya

(Zimmerman & Cleary 2006 dalam Kristiyanti ,2016 hlm. 55) mengatakan bahwa pada masa remaja, kepercayaan pada kemampuan sendiri, yang merupakan bagian dari *Self Regulated learning*, sangat dipengaruhi oleh perilaku dan atau umpan balik dari orang-orang penting di sekitar siswa, seperti teman sebaya. Sedangkan Newman menyatakan bahwa siswa yang memiliki *Self Regulated Learning* adalah siswa yang memiliki perasaan otonomi yang tinggi. Tetapi hal ini bukan berarti mereka terisolasi dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, sebaliknya, mereka adalah siswa yang merasa nyaman untuk meminta bantuan ketika membutuhkan. Bagi siswa di masa remaja, teman sebaya adalah orang-orang yang dapat memfasilitasi kebutuhan ini.

Hubungan *Civic Responsibility* dengan *Self Regulated Learning* memiliki keterkaitan erat dalam konteks pendidikan dalam pengembangan kepribadian peserta didik sehingga dalam pengembangan kepribadian *Civic Dispostion* mengacu pada sikap dan perilaku yang mencerminkan partisipasi aktif dalam lingkungan sekolah dan tanggung jawab. Sedangkan *Self-Regulated Learning* adalah suatu proses dimana peserta didik mengontrol dan mengatur proses belajarnya sendiri, termasuk menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi hasil. Dengan mengembangkan

keterampilan belajar mandiri, siswa dapat mengelola pembelajaran mereka dengan lebih baik, selanjutnya tidak hanya dalam pembangunan karakter saja melainkan dapat menumbuhkan motivasi pembelajaran mandiri melibatkan aspek motivasi yang penting bagi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi dan mampu mengatur proses belajarnya cenderung lebih bersedia mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti mengikuti kegiatan sosial maupun kegiatan dilingkungan sekolah. Melalui proses refleksi dan evaluasi diri, siswa mampu memahami dampak tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. Ini adalah bagian penting dari karakter sipil oleh karena itu, pengembangan *Self-Regulated Learning* dapat berkontribusi pada pembentukan disposisi behavioral citizen yang positif. Karena peserta didik mampu mengatur proses belajarnya, mereka cenderung lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam situasi sosial dan kemasyarakatan.

3. Kajian Ilmu Kewarganegaraan (*Civics*)

a. Definisi *Civics*

Menurut Sri Wuryan dalam buku ilmu kewarganegaraan (2014, hlm.1) mengemukakan asal usul kata "*civics*" di mana secara etimologis berasal dari kata "*civicus*" yang merujuk pada warga negara atau penduduk sebuah kota (polis). Istilah ini berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi langsung dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno di Athena.

Civics menurut Edmonson dikutip dari Ubaedillah (2015, hlm. 13) menyatakan bahwa makna "*civics*" didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, dan hak warga negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa *civics* merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana dijelaskan dalam dictionary of education. Levine dalam Ryan (2018) mengemukakan bahwa "*civic education is a discipline without a field with contribution coming from political, science, psychology,*

sociology, educational policy, and social studies education”. Dengan kata lain bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah disiplin ilmu dengan kontribusi yang berasal dari ilmu politik, psikologi, sosiologi, kebijakan pendidikan dan pendidikan ilmu sosial. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) bersifat interdisipliner, teori dan penelitian dalam bidang pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki perspektif yang saling melengkapi dan kontradiktif yang digunakan untuk memperkuat pemikiran dan praktek di lapangan. Sejalan dengan itu dalam Dictionary of Education (Somantri, 1976: 45) dinyatakan bahwa Civics: merupakan unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan menurut (Cholisin, 2013 hlm.4) Ilmu Kewarganegaraan (IKN) merupakan terjemahan dari Civics. Secara etimologis civics berasal dari kata civicus (bahasa Latin) yang berarti dengan citizens (Bahasa Inggris) yang dapat diartikan: 1) 'warga negara', 'penduduk dari sebuah kota', 'sesama warga negara', 'sesama penduduk', 'orang setanah air', 'bawahan atau kawula.

b. Definisi *Civic Education*

Menurut (Barson 1999 hlm.4) dalam bukunya yang berjudul belajar *Civic Education* Dari Amerika Civic Education dalam demokrasi civic Education adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (Self Government). Menurut Benjamin & Barber 1992 dalam Branson, 1999 hlm.5) civic education adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis,berpikir secara kritis ,dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural ,memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karena mengkomodasi pihak lain semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

Berdasarkan berbagai pandangan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa civic education merupakan suatu bidang studi yang sangat penting dan kompleks. Civic education tidak hanya sebatas

mempelajari tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang hak dan kewajiban warga negara, partisipasi dalam demokrasi, serta pengembangan karakter dan sikap yang baik sebagai warga negara.

c. Tujuan *Civic Education*

Menurut (Branson, 1999 hlm.7) Tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung-jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) penguasaan terhadap pengetahuan penguasaan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional amerika.

Maka dari itu , tujuan utama *civic education* untuk membekali individu dengan kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan atau sejarah negara, tetapi lebih jauh lagi untuk membentuk warga negara yang cerdas dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik, sosial, dan ekonomi, sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. sehingga membentuk warga negara yang aktif seperti mendorong individu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik dan sosial, baik di tingkat lokal maupun nasional, dan membentuk warga negara yang berkarakter yang dapat mengungkapkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi hukum.

d. Kemampuan utama civic education

(Branson, 1999 hlm. 8) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul belajar *civic education* dari amerika komponen komponen utama *civic*

education yang cocok dalam masyarakat demokratis lebih dari 3000 individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan dan atau proses standar nasional ini. Standar-standar yang telah diterima dengan baik dan ditanggapi secara kritis, bukan hanya di negara asalnya, tetapi juga di negara-negara lain, telah mengidentifikasi tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak- watak kewarganegaraan (*civic dispositions*).

1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Menurut Carter 1997 dalam (Branson,1999 hlm.7) Pengetahuankewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Menurut prespektif (Winarno, 2013 hlm.108) Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara.

Komponen pengetahuan kewarganegaraan menurut (Branson, 1999 hlm.9) diwujudkan kedalam lima pertanyaan yang di ajukan kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang bisa berpikir , kelima pertanyaan tersebut sering kali di ajukan kepada peserta didik di Amerika Serikat dalam pembelajaran *Civics and Government* . Lima pertanyaan yang dimaksud adalah :

- a) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan?
- b) Apa fondasi-fondasi sistem politik Amerika?
- c) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh Konstitusi mengejawantah tujuan-tujuan,nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika?
- d) Bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain di dunia?
- e) Apa peran warganegara dalam demokrasi Amerika?

Menurut (Winarno,2013 hlm.109 - 110) komponen pengetahuan kewarganegaraan juga banyak dikembangkan oleh beberapa lembaga studi. Komponen pengetahuan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Center For Indonesian Civic Education (CICED) meliputi berikut ini:

- a) Prinsip demokrasi
- b) Memahami konstitusi negara.
- c) Hak dan tanggung jawab warga negara.
- d) Negara merupakan supremasi hukum.
- e) Pemerintahan yang baik.
- f) Kewarganegaraan.
- g) Kedaulatan rakyat.
- h) Bebas dan adil.
- i) Kesetaraan dan pemerataan
- j) Keadilan.
- k) Hak Asasi Manusia.
- l) Kebudayaan.
- m) Perbedaan budaya.
- n) Proses demokrasi
- o) Kegiatan kewarganegaraan
- p) Identitas Nasional
- q) Masyarakat Sipil
- r) Ekonomi pasar bebas.
- s) Proses Politik.
- t) Distribusi Kekuasaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "civic knowledge" merujuk pada pemahaman individu mengenai konsep dasar, prinsip, serta struktur pemerintahan dan kewarganegaraan, termasuk hukum, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

2) Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*).

Jika warganegara mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan tanggung-jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat.

Kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh *civic education* yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti check and balance legislative atau peninjauan ulang hukum (*judicial review*) menunjukkan adanya pemaha man. Dalam Cahyono et al., (2024 hlm,3) menjelaskan bahwa *civic skills* meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi.

- a) Keterampilan intelektual yang diharapkan dari warga negara dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan meliputi:
- b) Kemampuan untuk mengidentifikasi memungkinkan warga untuk mengenali sesuatu yang masih samar-samar.
- c) Kemampuan untuk membedakan dan membandingkan.
- d) Kemampuan untuk memperjelas sesuatu yang memiliki benang merah.
- e) Kemampuan untuk menentukan asal-usul dan esensi sesuatu.
- f) Kemampuan untuk mendeskripsikan objek, proses, institusi, fungsi, tujuan, alat, dan kualitas dalam istilah yang jelas dan tidak jelas, serta membuat laporan tertulis dan lisan tentang karakteristiknya.
- g) Kemampuan untuk menjelaskan dengan baik hasil identifikasi, deskripsi, dan klarifikasi tentang penyebab, sifat, tujuan, fungsi, peran, dan makna dari suatu kejadian.
- h) Kemampuan mengevaluasi posisi dengan menggunakan kriteria atau standar untuk mengambil keputusan tentang kekuatan dan kelemahan posisi suatu isu tertentu, tujuan posisi, dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengambil sikap/posisi dengan menggunakan kriteria atau standar tertentu untuk menentukan pilihan atau membuat pilihan baru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengemukakan argumentasi atas sikap yang diambil, dan menanggapi argumentasi yang tidak disepakati.

Menurut John J. Patrick dalam "*Introduction to Education for Civic Engagement in Democracy*" (2000) dikutip dari (Winarno, 2013 hlm.153-152) membuat kategori kecakapan intelektual dan partisipatoris sebagai berikut :

- 1) *Intellectual Civic Skills* (Keterampilan sipil intelektual) terbagi menjadi:
 - a. *Identifying and describing information about political and civic life* (Mengidentifikasi dan mendeskripsikan informasi tentang kehidupan politik dan masyarakat.)
 - b. *Analyzing and explaining information about political and civic life.*
 - c. (Menganalisis dan menjelaskan informasi tentang kehidupan politik dan masyarakat).
 - d. *Syntesizing and explaining information about political and civic life.*
 - e. (Mensintesis dan menjelaskan informasi tentang kehidupan politik dan masyarakat).
 - f. *Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues.*(Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu publik).
 - g. *Thinking critically about conditions of political and civic life.* (Berpikir kritis terhadap kondisi kehidupan politik dan masyarakat)
 - h. *Thinking constructively about how to improve political and civic life.* (Berpikir konstruktif tentang bagaimana meningkatkan kehidupan politik dan sipil).
2. *Participatory civic skills* (Keterampilan Skill yang partisipatif)
 - a. *Interacting with other citizens to promote personal and common interests.* (Berinteraksi dengan warga negara lain untuk memajukan kepentingan pribadi dan bersama)

- b. *Monitoring public events and issues* (pemantau peristiwa dan permasalahan publik bermusyawarah dan mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik).

Artinya *Civic Skill* menunjukkan bahwa keterampilan kewarganegaraan yang baik sangat penting bagi warga negara dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan intelektual dan partisipatif yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam kehidupan politik dan sosial.

3. Watak-Watak Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*)

Komponen mendasar ketiga dari *civic education* adalah watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan. Sehingga dapat diartikan dalam Pandangan Barson (1999 hlm.23) memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Dengan mengimplementasikan ketiga komponen yang beliau kemukakan, kita dapat mencetak generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasandra, dkk (2018) mengatkan *civic disposition* adalah sifat yang harus dimiliki warga negara untuk mendukung partisipasi politik, sistem politik yang sehat, dan kepentingan umum. *Civic Disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik warga negara.

Civic disposition atau yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau karakter yang mendukung dan mempromosikan

kewarganegaraan dan pemerintahan. Branson (1999) dalam Mentari, dkk (2019 hlm. 25) mengatakan bahwa perilaku kewarganegaraan merupakan karakteristik publik dan privat yang sangat penting dalam mendukung dan mempertahankan demokrasi sesuai dengan beberapa hal tersebut maka penerapan karakter bangsa (*citizen character*) harus diciptakan melalui pendidikan.

Tujuan *Civic Disposition* adalah menumbuhkan karakter warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab dari tiap individu, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap martabat manusia dari setiap individu, selanjutnya karakter public juga tidak kalah penting seperti kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi. Barson (1999, hlm.23)

Ciri-ciri *civic disposition* menurut Barson (1999 hlm. 23-25) terdiri dari karakter privat yaitu sebagai berikut :

- 1) Memenuhi tanggung jawab persoal
- 2) Menghormati harkat dan martabat setiap individu.

Sedangkan karakter publik *Civic Disposition* terdiri dari :

- 1) Kepedulian sebagai warga negara.
- 2) Kesopanan.
- 3) Mengindahkan aturan main (*Rule of law*)
- 4) Berpikir kritis.
- 5) Bernegosiasi dan berkompromi .
- 6) Kemauan untuk mendengar.

Menurut Barson (1999 hlm 23) Karakter privat dan publik dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota masyarakat yang independen, artinya kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan.

- 2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, artinya bertanggung jawab dalam partisipasi politik ,membayar pajak serta bertanggungjawab dalam menafkahi anak.
- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu ,artinya sebagai warga negara kita harus memiliki prinsip menghrgai hak hak minoritas dan menghargai hak hak kepentingan sesama warganegara .
- 4) Berpartisipasi dalam urusan urusan kewarganegaraan secara bijaksana.
- 5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konsitusional secara sehat. Karakter ini mengarahkan warga negara untuk bertindak dengan damai dan legal dalam menaati peraturan atau hukum yang ada di negara.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan, *Civic Disposition* merupakan kombinasi karakter privat yang sangat penting untuk mendukung dan mempertahankan demokrasi. Hal ini mencerminkan karakter warga negara yang mendukung keterlibatan dalam kehidupan bernegara, baik dalam ruang lingkup publik maupun privat. Oleh karena itu, penguatan dan pembentukan sikap kewarganegaraan di lingkungan sekolah bertujuan untuk membangun kepribadian peserta didik agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab serta mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Dalam aspek tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic Responsibility*) yang dimana termasuk kedalam karakter privat mencakup sifat-sifat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, penghargaan terhadap martabat manusia. Sehingga *Civic Responsibility* akan diuraikan dibawah.

4. *Civic Responsibility*

a. Definisi *Civic Responsibility*

Menurut Cholisin (2013 hlm. 54) tanggung jawab krwarganegaraan (*Civic Responsibility*) adalah tanggung jawab atas melaksanakan hak (rights) dan kewajiban (duty) sebagai warga negara. Tanggung jawab menjadi sesuatu yang penting agar dalam melaksanakan hak-kewajiban, dilakukan menurut aturan main yang berlaku, sehingga mengurangi perbuatan melanggar hukum dan terarah (tidak asal-asalan), sehingga upaya membangun bangsa dapat semakin didekat. Sedangkan menurut Menurut Widagdho (1991) dalam Malik Purnama et al., (2024 hlm. 6) Tanggung jawab kewarganegaraan sebagai kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Artinya segala bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara merupakan wujud keputusan sikap yang harus diiringi juga dengan rasa tanggung jawab. Dapat ditarik kesimpulan maka *Civic Responsibility* merupakan kesadaran setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan memiliki rasa tanggung jawab, sehingga seseorang dapat menghindari pelanggaran hukum serta bertindak dengan lebih terarah dan bijaksana. Selain itu, tanggung jawab juga mencerminkan kesadaran atas setiap perilaku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Artinya, setiap tindakan yang diambil harus disertai dengan pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Dengan begitu, tanggung jawab kewarganegaraan menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

b. Indikator *Civic Responsibility*

Menurut Cogan dalam Djahiri, (2002 hlm. 92) memiliki Perspektif tersendiri tentang ciri-ciri warga negara yang baik dalam perspektifnya warga Negara yang baik adalah warga negara yang minimal harus memiliki minimal 4 indikator diantaranya sebagai berikut :

- 1) Rasa kepribadian/jati diri mandiri (*a sense of identity*). Yang memiliki arti bahwa peserta didik harus memiliki kepribadian atau jati diri merujuk pada pemahaman individu tentang siapa dirinya, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan budaya yang dianut, sehingga peserta didik yang memiliki jati diri yang kuat akan merasa bangga terhadap asal-usulnya, menghargai keragaman, dan mampu berinteraksi dengan orang lain dengan rasa saling menghormati. Hal ini penting untuk membangun rasa kebersamaan di lingkungan sekolah.
- 2) Rasa tanggung jawab dan kewajiban- kewajiban (*obligation*) yang menjadi kewajiban untuk rasa tanggung jawab dan kewajiban dalam peserta didik mencakup kesadaran akan peran mereka dalam lingkungan sekolah, kewajiban untuk belajar dengan giat, menghormati guru dan teman, serta berkontribusi pada kegiatan sosial di sekolah.
- 3) Minat dan keterlibatan akan kepentingan umum (*publik affairs*) sehingga minat dan keterlibatan dalam kepentingan umum menunjukkan bahwa peserta didik peduli terhadap isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam organisasi siswa, kegiatan sosial, atau diskusi tentang isu-isu terkini.
- 4) Kemampuan untuk menyerap/menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*basic societal values*). Yang artinya berarti peserta didik mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Burhanudin (2000), tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu tindakan atau tugas yang diemban, serta kemampuan untuk memikul risiko dari tindakan yang dilakukan, sebagaimana menurut (Cahyono, 2024) indikator *Civic Responsibility* meliputi :

- 1) Disiplin dalam mematuhi waktu untuk bergabung dalam pembelajaran.
- 2) Menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing.
- 3) Memperhatikan guru saat penyampaian materi pembelajaran di kelas.
- 4) Fokus dan memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran.
- 5) Selalu meminta izin sebelum mengajukan pertanyaan.
- 6) Menanggapi dengan menggunakan bahasa yang sopan saat bertanya atau menjawab pertanyaan
- 7) . Aktif dalam kegiatan diskusi kelompok atau tugas kelompok.
- 8) Siap menerima perintah dan menyelesaikan tugas dengan baik serta tepat waktu.

Oleh karena itu pengembangan kepribadian dan jati diri peserta didik sangat penting dalam menciptakan individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan umum, dan mampu menyerap nilai-nilai dasar masyarakat. Peserta didik yang memiliki jati diri yang kuat akan menghargai keragaman dan berinteraksi dengan rasa saling menghormati, sementara rasa tanggung jawab mendorong mereka untuk berkontribusi positif di lingkungan sekolah. Selain itu, keterlibatan dalam isu-isu sosial dan kemampuan untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti keadilan dan toleransi akan membentuk karakter yang baik dan mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Pembentukan kepribadian dan identitas diri siswa sangat penting dalam menciptakan orang yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan bersama.

Dengan indikator-indikator tanggung jawab sosial yang telah disebutkan, peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan,

berinteraksi dengan saling hormat, serta berkontribusi positif di lingkungan sekolah. Rasa tanggung jawab yang ditanamkan akan mendorong mereka untuk ikut serta dalam isu-isu sosial dan menerapkan nilai-nilai dasar masyarakat, seperti keadilan dan toleransi.

Pendidikan yang menyeluruh tidak hanya menekankan pencapaian nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai sosial yang penting dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, siswa diharapkan bisa menjadi penggerak perubahan positif, mampu beradaptasi dalam berbagai situasi, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati. Melalui proses ini, diharapkan terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.

5. Kajian Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Persekolahan

a. Pendidikan Pancasila dan kurikulum disekolah

Menurut (John searls dalam Wahab , 2023 hlm . 247) *civics* mata pelajaran yang menekankan pada aspek teoretis tentang warga negara dan pemerintah serta hubungan antara warga negara dengan warga negara, dan warga negara dengan pemerintah yang diatur oleh hukum merupakan cabang dari Ilmu Politik yang disebut dengan *political democracy*. Studi tentang demokrasi politik di sekolah tampil dengan aspek-aspek yang berbeda. Sehingga pendidikan kewarganegaraan (*Civic education*) lebih mekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara permasalahan kemasyaraatan. Sehingga pendidikan pancasila dipersekolahan lebih menekankan kearah pembentukan karakter perserta didik disekolah yang dimana sejalan dengan Zaman & Salatiga dalam Anugrah (2024 hlm,25) Pendidikan karakter sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan

bermoral. Hal ini dikarenakan pendidikan karakter bertujuan untuk membangun fondasi moral yang kuat, yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pendidikan karakter membantu siswa untuk mengembangkan empati, rasa tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang di ajarkan kepada Peserta Didik di Sekolah yang lebih efektif dan efisien adalah pendidikan Kewarganegaraan yang di sampaikan pada siswa dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan yang memebtuk karakter siswa yang harus ditanamkan kepada siswa sejak dini.

Dapat disimpulkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, bermoral, dan memiliki kesadaran hukum. Sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membantu siswa mengembangkan empati, rasa tanggung jawab, integritas, serta kepedulian terhadap sesama, yang pada akhirnya akan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan kehidupan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Maka dari itu pendidikan pancasila harus ada di setiap jenjang persekolahan diantaranya :

1) Pendidikan Pancasila di Jenjang Sekolah Dasar / MI

Menurut (Seftriyana, 2023 hlm 3)Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan *worldwide*, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan pancasila disekolah dasar diorientasikan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan itu menurut

(Fikri, 2024 hlm.27) pendidikan pancasila dapat membangun Pendidikan karakter atau moral sendiri sangat penting dan harus diterapkan di SD/MI agar menciptakan peserta didik memiliki sifat yang baik dan bertanggung jawab dengan apa yang di lakukan atau putuskan terhadap sesuatu yang menghantarkan kepada kesuksesan di masa datang. Artinya di tingkat sekolah dasar, Pendidikan Pancasila lebih ditekankan pada upaya menumbuhkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini. Hal ini dilakukan melalui pembelajaran yang berbasis praktik, seperti kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, pembiasaan sikap jujur dan bertanggung jawab, serta pemahaman akan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu membangun karakter yang baik, memiliki kesadaran moral yang tinggi, serta bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Pendidikan karakter yang berbasis Pancasila ini sangat penting dalam membentuk kepribadian generasi muda yang berkualitas.

b. Pendidikan Pancasila di jenjang SMP\Mts

Menurut (Rika Widianita, 2023) pendidikan pancasila dijenjang SMP/MTS bahwa pembinaan ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, sejatinya merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, secara bergotongroyong, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memang diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Artinya pada jenjang ini peserta didik sudah bisa mengimplementasikan ideologi pancasila yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Pendidikan Pancasila di jenjang SMA\SMK

Pendidikan Pancasila tidak hanya sekadar pengajaran nilai-nilai, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa. Menurut Fikri (2024) pendidikan

Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk karakter generasi muda dengan berlandaskan pada nilai-nilai nasionalisme". Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi landasan untuk menanamkan pada diri siswa sikap positif dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Pendidikan pancasila dalam jenjang sma /smk lebih memahami konsep-konsep, sejarah, pengetahuan, dan wawasan tentang Pancasila. Yang artinya melalui pemahaman konsep-konsep Pancasila, peserta didik dapat memahami nilai-nilai dasar yang membentuk karakter bangsa. Pemahaman sejarah Pancasila memberikan wawasan tentang proses perumusannya, sehingga menumbuhkan rasa kebangsaan.

Maka dapat disimpulkan pendidikan pancasila dalam jenjang sekolah dapat membentuk enam karakteristik primer yaitu beriman, bertaqwa kepada yang kuasa yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan, bernalar kritis dan kreatif, serta menjadikan .

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penulisan penelitian ini, peneliti memilih beberapa contoh penelitian relevan dan identik dengan topik penelitian yang akan dilakukan dan menggunakannya sebagai referensi dalam penelitian ini dengan melihat adanya keterkaitan yang bersinggungan dari proses dan hasilnya sebagai berikut:

1. Penelitian karya Latipa, dkk., pada tahun 2022 yang berjudul "pembentukan *Civic Disposition* pada peserta didik di madrasah aliyah negeri kota singkawang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan *civic disposition* dalam proses pembelajaran PPKn telah dilakukan oleh guru melalui perencanaan pembelajaran yang diadaptasi dari pendidikan karakter, pelaksanaan pembelajaran PPKn yang terintegrasi pada pendidikan karakter dan penilaian sikap yang dilakukan oleh guru. Melalui usaha-usaha tersebut diharapkan dapat membentuk *Civic Disposition* pada peserta didik secara optimal. Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu saling terhubung dikarenakan dalam sekolah diperlukan pembangunan *Civic Disposition* agar peserta didik dapat menanamkan

saling menghargai martabat individu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian ini sebagai rujukan karena terdapat persamaan yang dapat mengembangkan materi terkait bagaimana pengaruh pengaruh *Civic Responsibility* pada peserta didik melalui penerapan model *Self Regulated Learning* pada mata pelajaran pendidikan pancasila perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu dimana penelitian terdahulu berfokus pada guru untuk membangun karakter *Civic Disposition* sedangkan dipenelitian saya bahwa *Civic Disposition* tidak hanya di bentuk karakternya oleh guru melainkan bias ditanamkan dari *Self Regulated learning*.

2. Penelitian Karya Siti Aisyah dan Laili Alfitatahun 2017 yang berjudul” *Strategy Self Regulated Learning* pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area” Hasil penelitiannya yaitu yang telah dilakukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area angkatan 2014, 2015 dan 2016 dapat dikatakan bahwa mahasiswa tersebut belum memiliki nilai indeks prestasi kumulatif yang maksimal dikarenakan mereka belum mengaktifkan keseluruhan aspek dari strategy self-regulated learning yang ada. Adapun aspek-aspek strategy self-regulated learning adalah metakognisi, motivasi dan perilaku. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan sampel hanya melakukan satu atau dua strategi dan tidak melakukan keseluruhan strategi. Hal inilah yang mempengaruhi pencapaian indeks prestasi kumulatifnya menjadi kurang maksimal. Persamaan penelitian fokus pada *Self Regulated Learning* yang dimana Kedua penelitian menekankan pentingnya *Self Regulated Learning* dalam proses belajar. Keduanya mengkaji bagaimana aspek-aspek *Self Regulated Learning* dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik, baik dalam konteks akademik maupun pembentukan karakter . Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian ini sebagai rujukan mengenai penerapan strategi dalam *Self Regulated* pada peserta didik.
3. Dewi, R. R., Suresman, E., & Suabuana, C. (2021). “Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di persekolahan”. Hasil

penelitian perencanaan implementasi pendidikan keawarganegaraan sebagai pendidikan karakter di persekolahan khususnya di SDN 077 Sejahtera yaitu dalam perencanaan pembelajaran dilakukan pemasukan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam RPP serta langsung menambahkannya ke dalam kegiatan pembelajaran, dimana hal ini dilakukan melalui modifikasi RPP karakter berdasarkan jenis karakter yang ingin dicapai.

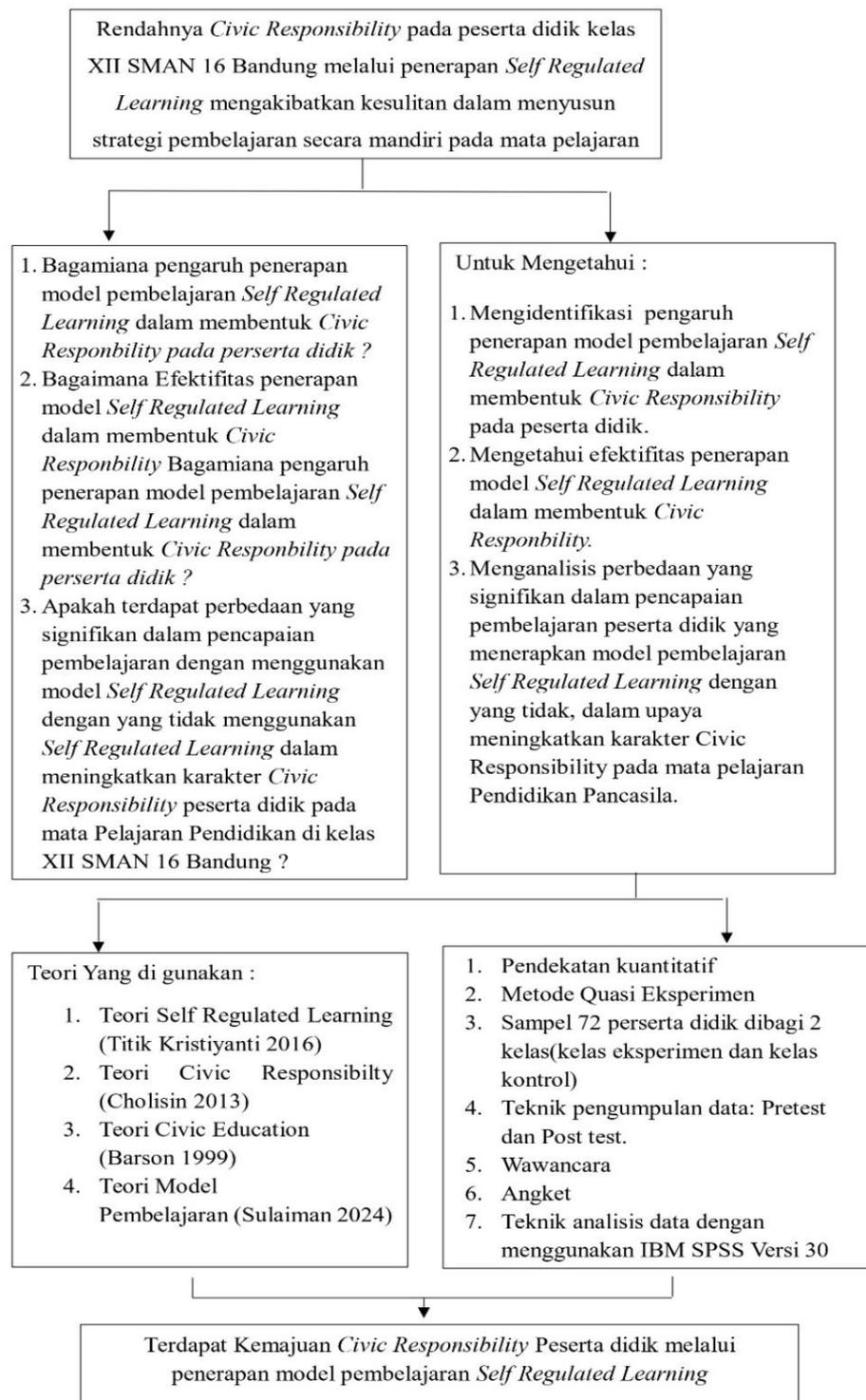
4. Penelitaian karya (Cahyono et al., 2024) yang berjudul “ Developing students’ *Civic Responsibility* using blended learning model with an asynchronous system pengembangan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic Responsibility*) mahasiswa melalui model blended learning dengan sistem asinkron “Studi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembelajaran asinkron dalam meningkatkan *Civic Responsibility* mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran asinkron lebih efektif dalam meningkatkan *Civic Responsibility* dibandingkan dengan pembelajaran sinkron, dengan rata-rata skor post-test lebih tinggi (91,50)
5. Penelitian karya Amalia Anis Kusumawati pada tahun 2024 yang berjudul “*Self Regulation* dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik” hasil penelitian ini menekankan bahwa self-regulation (regulasi diri) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama bagi mereka yang memiliki nilai akademik rendah. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang dilatih dalam keterampilan self-regulation, seperti menetapkan tujuan dan memantau kemajuan, mengalami peningkatan dalam motivasi dan kinerja akademik. Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian ini sebagai rujukan mengenai bahwa proses mengatur diri sendiri dalam pembelajaran dapat menentukan kemampuan belajar dalam diri baik dari menentukan jenis metode pembelajaran tersendiri.
6. Penelitian karya Devy Mukaromah Sugiyo, dan Mulawarman pada tahun 2018 yang berjudul “Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran ditinjau dari Efikasi Diri dan *Self Regulated Learning*” maka hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap keterlibatan siswa, ada pengaruh yang signifikan *Self Regulated Learning* terhadap keterlibatan siswa, dan ada pengaruh yang signifikan antara efikasi dan *Self Regulated Learning* secara bersama-sama terhadap keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian ini karena regulated learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa, yang merupakan aspek penting dalam pembentukan *civic responsbilty*. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

7. Penelitian karya Nurhidayanti Juniar pada tahun 2024 yang berjudul “Studi literatur: Pengaruh *Self Regulated Learning* terhadap prestasi belajar siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan self-regulated learning memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan menerapkan metode ini, siswa dapat menjadi lebih inisiatif, aktif, dan mandiri dalam proses belajar mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran belajar secara internal.
8. Penelitian karya Ina Permatasari Harahap pada tahun 2023 yang berjudul “Meningkatkan *Self Regulated Learning* pada siswa melalui strategi belajar berdasar regulasi diri” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi belajar yang berfokus pada self-regulated learning (*SELF REGULATED LEARNING*) dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa. Meskipun siswa awalnya memiliki skor rendah dalam *SELF REGULATED LEARNING*, setelah perlakuan, skor tersebut meningkat ke kategori sedang. Selain itu, terdapat peningkatan dalam durasi belajar dan perencanaan yang lebih baik, serta perbaikan dalam hasil akademik di berbagai mata pelajaran. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk berubah dan kerjasama dalam proses penelitian, yang berkontribusi pada perbaikan aspek kognitif, motivasional, dan perilaku belajar. Penelitian ini menekankan pentingnya self-regulation dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

C. Kerangka Berpikir

Umar Sekaran dalam Sugiyono (2024, hlm 95) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber : Disusun Oleh Peneliti 2025

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi

Asumsi merupakan tolak ukur kerangka pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis oleh karena itu hipotesis, asumsi penelitian yang diajukan dapat berupa teori-teori evidenai-evidensi, atau dapat pula berasal dari pemikiran peneliti. Oleh karena peneliti menuangkan asumsinya sebagai berikut:

- 1) Model *Self Regulated Learning* dapat meningkatkan civic responsibility pada peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila.
- 2) Penyampaian model SLR dapat membangkitkan partisipasi aktif peserta didik untuk membantu membentuk sikap tanggung jawab peserta didik dan membantu kebutuhan peserta didik.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang menurut teori termasuk dalam kerangka berpikir dan belum dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Dengan uji ini memungkinkan penulis untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hipotesis dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam *Civic Responsibility* peserta didik setelah menggunakan SLR pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Ha : Terdapat peningkatan yang signifikan dalam hasil *Civic Responsibility* peserta didik setelah menggunakan SLR pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila